BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.[1] Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan antara jenis kelamin, status sosial atau profesinya. Sebab menjadi seorang pemimpin itu merupakan suatu kemampuan pribadi dan karakteristiknya masing-masing. Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama. Maka oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak untuk mencapai apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Allah telah menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama yakni berupa potensi akal dan potensi hidup. Laki-laki dan perempuan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat tempat mereka hidup.

[1] Husen Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta, LkiS,2007), h. 25.

Kepemimpinan merupakan kunci utama dalam sebuah organisasi, hal ini dikarenakan maju mundurnya, berkembang tidaknya suatu organisasi tergantung dari pola kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Memang banyak faktor yang menyebabkan maju mundurnya suatu lembaga atau organisasi, tergantung dari modal yang cukup, manajemen yang tertata, sumber daya manusia yang memadai, dan struktur organisasi atau lembaga yang tertata dengan baik, namun hal tersebut masih tergantung bagaimana sosok kepemimpinan dalam sebuah lembaga tersebut.

Berdasarkan dari berbagai pengertian kepemimpinan di atas, perlu diperjelas juga arti dari pola. *Pola* adalah model, cara kerja, atau sistem. Kepemimpinan adalah suatu proses, perilaku atau hubungan yang menyebabkan suatu kelompok dapat bertindak secara bersama-sama atau secara bekerjasama atau sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tujuan bersama.[2] Ngalim Purwanto

[2] Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial:Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 40.

menyatakan pola atau gaya kepemimpinan adalah cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan.[3]

Dengan demikian bila merujuk dari berbagai teori tentang pengertian yang dikemukakan di atas disimpulkan bahwa pola kepemimpinan adalah pola atau gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang atau lebih yang menggunakan pengaruh, wewenang atau kekuasaan terhadap orang lain dalam menggerakkan mereka guna mencapai suatu tujuan. Dalam lingkup politik, kepemimpinan ada di tangan penguasa atau Presiden sebagai kepala negara. Penguasa Atau Presiden sebagai pengelola dan eksekutif di suatu negara yang menunjukkan dirinya sebagai pelaksana teknis managerial yang memiliki keterampilan-keterampilan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya kearah perkembangan ataupun tidaknya suatu negara.

Kepemimpinan seorang perempuan sekarang ini bukan menjadi suatu hal yang aneh karena di Indonesia pemimpin bukan hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja namun

[3] Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet XVI, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2006),h. 48.

perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan seorang perempuan sekarang ini bisa disejajarkan dengan kepemimpinan seorang laki-laki baik dalam kinerja maupun dalam melayani masyarakat. Perempuan yang mulanya hanya dipadang sebelah mata dan diragukan dalam memipin sekarang dipandangan positif oleh masyarakat.

Islam juga telah mengajarkan untuk menempatkan setiap manusia berada pada posisi yang sederajat (*egaliter*), bahwa tidak ada manusia yang tergolong sebagai kelas satu atau kelas dua, karena di mata Allah SWT semua manusia kedudukannya adalah sama, hanyalah level ketaqwaan yang membedakan di antara mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

(الحجرات : ١٣)

> Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*." (Q.S. Al-Hujarat: 13)[4]

Setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, Nabi menghapus segala aspek yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah yang bertentangan dengan syariat.[5] Diantara kelompok masyarakat *mushtadh"afin* yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan. Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki.[6]

Menurut Musdah Mulia dalam masyarakat Islam perempuan menempati kedudukan yang sangat penting yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau

---

[4] Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, *Al-quran dan Terjemahnya,* (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 745.

[5] Dedi Supriadi, *Sejarah dan Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 62.

[6] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan),* (Bandng : Mizan, 2005), h. 22.

aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada kaum perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal ini disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan.[7]

Dalam buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Musdah Mulia membagi tiga kategori peran dan posisi kaum perempuan.

> *Pertama*, perempuan sebagai anak. *Kedua*, perempuan sebagai istri. *Ketiga*, perempuan sebagai warga negara. Sebagai anak, seorang perempuan dinilai sejajar dengan kaum laki-laki. Sebagai istri, seorang perempuan bertanggung jawab secara adil terhadap keluarga. Adapun sebagai warga negara, seorang perempuan mendapat hak-hak dan tanggung jawab yang setara dengan kaum laki-laki.[8]

Demikianlah bahwa peran kaum perempuan dalam politik telah terbukti mewarnai segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pandangan lama yang harus memarjinalkan

---

[7] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis....*, h.43

[8] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: kibas press, 2008), h. 12.

kaum perempuan sebagai warga kelas dua. Sebagai pihak yang hanya punya hak berkiprah di wilayah domestik, sementara wilayah publik dipandang bukan menjadi hak kaum perempuan. Kaum perempuan dipandang sebagai pihak yang lemah, emosional, tidak dapat menggunakan akal budinya, dan tidak mampu mengembangkan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Kauum perempuan dipandang tidak akan mampu masuk kewilayah politik pemerintahan, karena wilayah ini dipandang sebagai wilayah yang keras, kompleks dan membutuhkan stamina fisik, sehingga tidak mungkin kkaum perempuan berkiprah disana.

Para pemimpin perempuan, pada umumnya banyak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menempatkan diri dalam posisi mereka. Itu sebabnya, mereka dapat memberikan hukuman kepada seorang bawahan, sekaligus menunjukan rasa prihatin. Pemimpin perempuan didapati lebih banyak dapat bersabar dalam menimba pengalaman, memperhatikan dan hingga mendapatkan reputasi bahwa ia kompeten. Perempuan yang benar-benar bebas menjadi diri sendiri dan merasa nyaman

dalam posisi kepemimpinan, bebas untuk mengizinkan orang lain mendapatkan lebih banyak kebebassan. Mereka tidak menunjukan sikap suka meraja seperti masyarakat umum pikirkan. Malahan, mereka sanggup berpikir mengenai tujuan jangka panjang dan mengembangkan kepemimpinan yang kreatif dan khas.

Salah satu kepala daerah yang ada di Banten yaitu Bupati Kabupaten Serang ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak. ia terpilih sebagai Bupati Serang periode ke-I tahun 2016-2021 dan sekarang terpilih kembali pada periode ke-II tahun 2021-2026. Sebelum menjabat sebagai Bupati Serang ia mendampingi Taufik Nuriman sebagai wakil Bupati Serang Periode 2010-2015. ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah lahir di Serang pada tanggal 23 Juli 1967. Beliau sangat aktif diberbagai bidang organisasi dan tidak jarang beliau menjadi ketua dari berbagai organisasi yang pernah diikutinya. Beberapa diantaranya yaitu ketua Palang Merah Indonesia pada tahun 2007-2011 dan tahun 2012-2017; kertua Perwosi Banten tahun 2007-2011; ketua IPSM Provinsi Banten tahun 2008-2013 dan ketua umum IPSM pusat tahun 2013-2018;

ketua Badan Narkotika Kabupaten Serang tahun 2010-2015; ketua Dekopinwil Provinsi Banten 2013-2015 dan ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten tahun 2013-2015.

Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam menjalankan kepemimpinan politiknya di Kabupaten Serang, tentunya akan memberikan gambaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam kepemimpinan politiknya, sehingga hal tersebut mencerminkan pola kepemimpinan politik dari Hj. Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang. pola kepemimpinan Hj. Ratu Tatu Chasanah akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Kabpuaten Serang.

Pola Kepemimpinan sebenarnya terkait mengenai pendekatan pendekatan yang digunakan oleh pemimpin dalam memimpin. Masyarakat sebagai subjek dan objek dalam kebijakan politik yang juga sebagai golongan yang dipimpin akan sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Maka dalam menggunakan pendekatan kepada masyarakat, pemimpin harus mengenali konteks yang dihadapi, sehingga pemimpin tepat dalam menggunakan pendekatannya.

Kepemimpinan politik beserta pola kepemimpinan politik merupakan hal yang penting dalam sebuah proses politik. Kepemimpinan politik dengan penggunaan dominasinya dalam bentuk pengaruh, memberikan gambaran mengapa kepemimpinan politik sebagai hal yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian.

Aparatur pemerintahan golongan pengikut (*subordinate*) dan Hj. Ratu Tatu Chasanah sebagai pemimpin, merupakan kesatuan dalam berjalannya proses politik dan pemerintahan di Kabupaten Serang. Para aparatur pemerintah yang kinerjanya kerap dikeluhkan oleh masyarakat, sebagai sebuah tantangan bagi Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam kepemimpinan politiknya. Pengambilan keputusan terhadap *subordinatenya*, sebagai sebuah cerminan pola Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam memimpin aparatur pemerintahannya.

Masyarakat Serang yang juga sebagai pengikut (*konstituen*) dari Hj. Ratu Tatu Chasanah, dan sebagai golongan yang dipengaruhi oleh pemimpin akan memberikan respon terhadap pola kepemimpinan politik Hj. Ratu Tatu Chasanah. Masyarakat

sebagai yang dipengaruhi akan memberikan kontribusi bagi perkembangan Kabpuaten Serang khususnya. Sesuai pemaparan dari latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang ***"POLA KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (studi kasus Bupati Kabupaten Serang)***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola kepemimpinan politik Bupati Serang dalam kepemerintahannya?
2. Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang tata kelola pemimpin perempuan di kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap pola kepemimpinan politik Bupati Serang dan perspektif fiqih siyasah mengenai tata kelola pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji dari kebenaran suatu pengetahuan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan politik Bupati Serang dalam kepemerintahannya.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah tentang tata kelola pemimpin perempuan di kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Setelah dilakuaknnya sebuah penelitian, penulis mengaharapkan kemanfaatan karya ilmiah ini baik untuk pribadi maupun untuk orang lain, maka kegunaan penelitiaan ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemikiran dan dapat dijadikan sumber informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pola kemimpinan politik perempuan yang ditinjau dari fiqih siyasah ataupun sebagai referensi serta pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian. Selanjutnya mampu memberi serta masukan bagi para pengamat politik yang menerapkan

kaidah syariah khususnya dalam pola kempemimpinan politik Bupati Serang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang berarti bagi para masyarakat umum dan khususnya pengamat politik yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang pola kepemimpinan politik perempuan yang ditinjau dari fiqih siyasah. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan refersensi terutama yang berkaitan dengan pola kepemimpinan politik perempuan perspktif fiqih siyasah. Dan bagi peneliti, hal ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta bisa di implmentasikan didalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Hendri Saputra mahasiswa pascasarjana S2 program studi Filsafat Agama IAIN Bengkulu tahun 2015/2016 yang berjudul "*Pemikirn Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*" hasil yang di peroleh dari Tesis Hendri Saputra yaitu:
    a. Pemikiran Musdah Mulia tentang pentingnya memberi argumen bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menindas orang lain. Termasuk menindas kaum perempuan yang secara materi dan inmateri dieksploitasi dan menganggap kehadiran perempuan tidak berfungsi dalam ranah publik dan hanya bisa berfungsi dalam ranah domestik. Maka dari itu Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan

umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

b. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan kepemimpinan politik perempuan, di antaranya: *pertama*, Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan bahwasanya semua manusia baik laki-laki atau wanita adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; *kedua*, intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; *ketiga*, esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; *keempat*, tidak ada larangan di dalam Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan

sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

2. Abdul Rahim, *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, Vol 2. No. 2. Tahun 2016. hasil yang diperoleh dari jurnal tersebut ialah:
    a. Peran perempuan dari berbagai aspek, baik itu dalam refroduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan, hal ini diungkapkan oleh berbagai informan bahwa perempuan yang aktif diorganisasi kemasyarakatan serta tidak memiliki ciri-ciri pemberani seperti halnya dengan laki-laki. Alasan inilah sehingga program kerja yang diusulkan perempuan tidak begitu banyak untuk diterima dan implementasikan ke dunia politik yang ada.

b. Posisi perempuan dalam partai politik rata-rata bersifat stereotipe, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan alasan bahwa dengan maupun tidak banyak dilibatkan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik adalah : pengaruh faktor pendidikan sangat besar dan sangat menentukan keaktifan kaum perempuan dalam keterlibatannya sebagai pengurus partai politik, karena semua tugas-tugas yang diembankan kepada perempuan dapat dilaksanakan berkat adanya pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Ini berarti bahwa ada relevansi antara tugas dengan pendidikan.

3. Eka Wulandari, *Pola Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*, mahasiswi S1 program studi Politik dan Kewarganegaaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil yang diperoleh dari skripsi Eka Wulandari yaitu:

a. Pola kepemimpinan yang diterapkan kepala Desa Senden adalah pola kepemimpinan yang demokratis hal ini terlihat dari cara kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, memecahkan suatu permasalahan dan membuat peraturan dilaksanakan berdasarkan musyawarah bersama
b. Kepemimpinan kepala desa perempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tidak membedakan pelayanan yang diberikan hal ini terlihat dari cara kepemimpinana kepala desa dalam melayani masyarakat dilakukan secara terbuka
c. Tanggapan masyarakat terhadap pola kepemimpinan kepala Desa perempuan sebagian besar masyarakat Desa Senden memberikan tangapan yang positif terhadap kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Senden. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat Desa Senden dalam menjalankan program pembangunan dan kegiatan yang ada di Desa Senden.

Faktor-faktor penghambat kepemimpinan Kepala Desa perempuan sebagai berikut: kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang di selengaran di Desa Senden dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam meminta dan menerima pelayanan.

G. Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik, karena kepemimpinan adalah motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat lainnya dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi politiknya. Sedangkan, dikatakan bahwa kepemimpinan muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan dapat berfungsi atas dasar adanya kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan.

Jabatan sebagai Bupati Serang Periode ke-II 2021-2026 merupakan sebuah tanggung jawab yang diperoleh Hj. Ratu Tatu

Chasanah dalam membangun Kabupaten Serang. Kepemimpinan politik Hj. Ratu Tatu Chasanah diharapkan akan membangun relasi dengan menggunakan pengaruh (*influence*) yang dimiliki oleh dengan pihak pengikut. Pengikut dalam pengertian kepemimpinan politik yang diutarakan oleh Wirawan,[9] bahwa pengikut ada beberapa, misalnya konstituen (*constituen*) tetapi ini lebih merujuk pada pemilih atau pendukung partai politik. Adapun partisipan juga dikatakan sebagai *subordinate*, yang diterjemahkan sebagai anak-buah yang "mengabdi" pada bosnya.

Pola kepemimpinan politik Hj. Ratu Tatu Chasanah dapat dilihat dari bagaimana Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam memimpin para pengikutnya. Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *pertama*, kepribadian Hj. Ratu Tatu Chasanah, *kedua*, keterlibatan pemimpin dalam perumusan kebijakan, *ketiga*, hubungan Pemimpin dengan pengikut. Dengan mengindentifakasi kepribadian Hj. Ratu Tatu Chasanah diharapkan memberikan gambaran mengenai pola kepemimpinan yang diterapkan terhadap pengiutnya; keterlibatan Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam

[9] Alfan Alfian, M. 2016. *Wawasan Kepimpinan Politik* (*Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan*). Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati. Hal 567

perumusan kebijakan; serta hubungan Hj. Ratu Tatu Chasanah dengan pengikut (*birokrat*) atau subordinate diharpakan peniliti dapat memperoleh gambaran mengenai pola kepemimpinan politik.

H. Metode Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah

Tipe penilitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan bagaimana pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah. Tipe penilitan yang bersifat deskriptif

diharapkan mampu menggambarkan, menjabarkan respon dari masyarakat Serang terhadap pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah. Dengan demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variable lain.

2. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian dan diharapkan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Penulis memperoleh pendapat atau opini tentang pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang dan bagaimana tanggapan dalam menyikapi permasalahan tersebut, melalui komunikasi langsung dengan pengamat

politik, tokoh agama, dan akademisi. Penulis telibat langsung mengumpulkan data, seperti rekaman hasil wawancara, serta foto kegiatan selama dilapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan pola kepimimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah, respon masyarakat Serang terhadap pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang dapat diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian atau pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan dilapangan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (Interview)

Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengamat politik, tokoh agama, dan akademisi, berisi seputar data yang berhubungan tentang pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah sebagai Bupati Serang periode 2021-2026, serta implikasinya terhadap respon masyarakat Serang. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus dari penilitan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum hingga pertanyaan yang bersifat khusus. Metode tersebut dilakukan agar penulis memperoleh dan menghasilkan data yang lengkap sehubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumen ini digunakan untuk menunjang data primer

atau data utama yang diperoleh dari informan mengenai masyarakat Serang dan pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah. Penulis melakukan analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan di bab IV. Penulis lalu membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

c. Observasi

Merupakan dari pengumpulan data. Dalam tradisi kualitatif, data tidak dapat diperoleh di belakang meja, tetangga, organisasi, dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang perilaku, sikap, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode observasi non-perticipant. Dalam hal ini peneliti datang ke lokasi penelitian namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapat penjelasan mengenai pola kepemimpinan politik Hj Ratu Tatu Chasanah dan implikasinya terhadap respon masyrakat Serang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisa data ada tiga yaitu, pertama reduksi data pada proses ini data yang telah diperoleh di lapangan kemudian dikurangi untuk diambil data-data yang pentingnya saja yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Selanjutnya adalah penyajian data sekaligus tahap verifikasi pada tahapan ini data-data penting yang telah diambil kemuadian disajikan sekaligus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dipilih tersebut untuk kemudian disajikannya dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF KEPEMIMPINAN BUPATI KABUPATEN SERANG

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang biografi Bupati Srang, kepemimpinan bupati Serang, karakteristik kepemimpinan Bupati Serang dan

BAB III KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan teoritis tentang pola kepemimpinan politik perempuan perspktif fiqih siyasah (studi kasus Bupati Kabupaten Serang)

BAB IV ANALISIS POLA KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN SERANG

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pola kepemimpinan perempuan perspektif fiqih siyasah (studi kasus Bupati Kabupaten Serang)

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.